

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 53 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN YANG

MENYELENGGARAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**FORMAT 1 PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN YANG KANTOR PUSATNYA BERKEDUDUKAN DI WILAYAH DKI JAKARTA DAN BANTEN**

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur IKNB Syariah  
Gedung Menara Merdeka  
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2  
Jakarta 10110

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha lain:

Nama : PT/Koperasi\*) .....  
Izin Usaha dari OJK : Nomor..... Tanggal.....  
Alamat : Jalan..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....  
Kota/Kabupaten.... Provinsi....  
No Telp/Fax : .....  
Email : .....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen yang berisi uraian paling sedikit sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha lain yang akan dilakukan, termasuk prosedur dan skema kegiatan usaha lain yang akan dilakukan;
- b. draf perjanjian yang akan digunakan dan mencerminkan akad yang akan digunakan;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. analisis prospek kegiatan usaha lain yang akan dilakukan;
- e. mitigasi risiko atas kegiatan usaha lain yang akan dilakukan; dan
- f. opini dan/atau persetujuan DPS Perusahaan atas pemenuhan Prinsip Syariah untuk kegiatan usaha lain yang akan dilakukan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan persetujuan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri.\*) ....., melalui alamat email.... atau nomor telepon.....

Demikian permohonan ini dan atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Direksi  
PT/Koperasi\*).....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

**FORMAT 2 PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN YANG KANTOR PUSATNYA BERKEDUDUKAN DI LUAR WILAYAH DKI JAKARTA DAN BANTEN**

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional/Kepala Otoritas Jasa  
Keuangan \*)

.....\*\*)

.....\*\*\*)

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha lain:

Nama : PT/Koperasi\*) .....

Izin Usaha dari OJK : Nomor..... Tanggal.....

Alamat : Jalan..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....  
Kota/Kabupaten.... Provinsi....

No Telp/Fax : .....

Email : .....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen yang berisi uraian paling sedikit sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha lain yang akan dilakukan, termasuk prosedur dan skema kegiatan usaha lain yang akan dilakukan;
- b. draf perjanjian yang akan digunakan dan mencerminkan akad yang akan digunakan;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. analisis prospek kegiatan usaha lain yang akan dilakukan;
- e. mitigasi risiko atas kegiatan usaha lain yang akan dilakukan; dan
- f. opini dan/atau persetujuan DPS Perusahaan atas pemenuhan Prinsip Syariah untuk kegiatan usaha lain yang akan dilakukan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan persetujuan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri.\*) ....., melalui alamat email..... atau nomor telepon.....

Demikian permohonan ini dan atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Direksi  
PT/Koperasi\*).....

.....

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*\*) Diisi nama Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau nama Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai kantor pusat Perusahaan
- \*\*\*\*) Diisi alamat Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau nama Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai kantor pusat Perusahaan

**FORMAT 3 FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN**

Formulir Permohonan Persetujuan Kegiatan Usaha Lain Perusahaan					
					
Nama Perusahaan :					
Nomor Surat Permohonan :					
Tanggal Surat Permohonan :					
Nomor & Tanggal Izin Usaha :					
Uraian Singkat mengenai Kegiatan Usaha Lain yang akan Dilakukan :					
Contact Person (Nama, Telp/ e-mail) :					
NO.	URAIAN			KETERANGAN	
	Uraian	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Keterangan
1.	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh Direksi/pengurus dan sesuai dengan Format 1 atau Format 2 Lampiran SE OJK Nomor .../SEOJK.05/2017?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Apakah perusahaan saat ini tidak sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan?			<i>Pasal 14 POJK Nomor 31/POJK.05/2016</i>	
3.	Apakah Perusahaan memiliki:				
	a. sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha lain? Sebutkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Sebutkan jumlah pegawai yang akan menangani kegiatan usaha lain. Dalam hal terdapat kualifikasi khusus untuk menjalankan kegiatan usaha lain maka melampirkan bukti sertifikasi atau dokumen lainnya yang mendukung bidang kegiatan usaha lain yang akan</i>

					<i>dilakukan.</i>
	b. infrastruktur yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha lain? Sebutkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Sebutkan infrastruktur yang telah disiapkan untuk melakukan kegiatan usaha lain</i>
	c. metode penyelenggaraan kegiatan usaha lain ( <i>standard operating procedure</i> )? Sebutkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Lampirkan standard operating procedure yang akan digunakan</i>
	d. kondisi keuangan tidak merugi pada laporan berkala terakhir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Periode laporan berkala: Jumlah laba bersih:</i>
4.	Apakah permohonan telah melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	a. kegiatan usaha lain yang akan dilakukan, termasuk prosedur dan skema kegiatan usaha lain yang akan dilakukan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b. draf perjanjian yang akan digunakan dan mencerminkan akad yang akan digunakan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	c. hak dan kewajiban para pihak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	d. analisis prospek kegiatan usaha lain yang akan dilakukan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	e. mitigasi risiko atas kegiatan usaha lain yang akan dilakukan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	f. opini dan/atau persetujuan DPS Perusahaan atas pemenuhan Prinsip Syariah untuk kegiatan usaha lain yang akan dilakukan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Dalam hal kegiatan usaha lain dilakukan dalam rangka kerja sama dalam rangka perolehan bisnis apakah telah memenuhi ketentuan:				
	a. dituangkan dalam perjanjian kerja sama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	tertulis?				
	b. tidak bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	d. menggunakan akad sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 2 SE OJK Nomor .../SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.	Dokumen lainnya (apabila ada, sebutkan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. formulir pemenuhan dokumen persyaratan administratif tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
2. dokumen yang disampaikan secara *online* sama dengan dokumen aslinya.

(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi

PT/Koperasi\*) .....

*tanda tangan*

(Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan :

	Tanggal	Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

**FORMAT 4 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN YANG KANTOR PUSATNYA BERKEDUDUKAN DI WILAYAH DKI JAKARTA DAN BANTEN**

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur IKNB Syariah  
Gedung Menara Merdeka  
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2  
Jakarta 10110

Menunjuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .... tanggal .... mengenai pemberian persetujuan kegiatan usaha lain Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah kepada PT/Koperasi\*) ...., dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha lain Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah pada tanggal .....

Sebagai kelengkapan laporan, bersama ini kami sampaikan fotokopi perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan Nasabah.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Direksi  
PT/Koperasi\*).....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

**FORMAT 5 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN YANG KANTOR PUSATNYA BERKEDUDUKAN DI LUAR WILAYAH DKI JAKARTA DAN BANTEN**

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional/Kepala Otoritas Jasa  
Keuangan\*)

.....\*\*)

.....\*\*\*)

Gedung Menara Merdeka  
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2  
Jakarta 10110

Menunjuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .... tanggal .... mengenai pemberian persetujuan kegiatan usaha lain Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah kepada PT/Koperasi\*) ....., dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha lain Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah pada tanggal .....

Sebagai kelengkapan laporan, bersama ini kami sampaikan fotokopi perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan Nasabah.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Direksi  
PT/Koperasi\*).....

.....

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Diisi nama Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau nama Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai kantor pusat Perusahaan
- \*\*\*) Diisi alamat Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau nama Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai kantor pusat Perusahaan

**FORMAT 6 FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN**

 <div style="text-align: center;"> <b>Formulir</b>  <b>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Lain</b>  <b>Perusahaan</b> </div>					
Nama Perusahaan :					
Nomor Surat Pelaporan :					
Tanggal Surat Pelaporan :					
Nomor & Tanggal Izin Usaha :					
Tanggal Dimulainya Kegiatan Usaha Lain :					
Contact Person (Nama, Telp/e-mail) :					
NO.	URAIAN			KETERANGAN	
	Uraian	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Keterangan
1.	Apakah surat pelaporan ditandatangani oleh Direksi/pengurus dan sesuai dengan Format 4 atau Format 5 Lampiran SE OJK Nomor .../SEOJK.05/2017?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Apakah penyampaian laporan sudah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Apakah laporan telah melampirkan fotokopi perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan Nasabah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Lampirkan fotokopi perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan Nasabah.</i>
4.	Dokumen lainnya (apabila ada, sebutkan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. formulir tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan</li> <li>2. dokumen yang disampaikan melalui layanan dalam jaringan (<i>online</i>) sama dengan dokumen aslinya.</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)                      Direksi PT/Koperasi ....  <i>tanda tangan</i></p> <p>(Nama Lengkap)</p> </div>					

<b>Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan</b>		
Catatan :		
	Tanggal	Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana